

**Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks
Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota
Provinsi Maluku)**

**oleh:
Yusron Dfinubun, Muhammad Gudono**

Abstract

This study comes from asymmetrical condition between the high failure of the implementation of the new autonomous region, since there is unnatural process and high willingness in doing regional expansion. The research aims to obtain empirical evidence concerning the financial performance of the district and the regional expansion of Maluku Province, to help reducing the high failure of the regional expansion of Maluku Province and other district generally in Indonesia, by minimizing the decline causes of the local financial performance. The measurement of financial performance of the district/ the regional expansion of Maluku Province use ten indicators of financial performance, such as the ratio of fiscal decentralization degree, the ratio of financial capacity, the ratio of financial independence, the ratio of PAD effectiveness, the degree of BUMD contribution, the activity ratio (routine expenditure and investment expenditure), the ratio of effectiveness and the efficiency of expenditure, and financial capability index. This study uses a qualitative method and two data collection techniques, as well as two data analysis. The first is by collecting book secondary data I LHP BPK on LKPD district/ the regional expansion of Maluku Province in 2010-2013. The data analysis that will be used is descriptive analysis. The second data collection technique is by doing interview. The interview is focused on four districts/ the regional expansion of Maluku Province, each region selected two SKPD which acts as the PAD manager and financial user.

Based on the results of the study, it is concluded that the financial performance of the district and the regional expansion of Maluku Province in 2010-2013 in terms of ratio and financial index is very low with an instructive relationship patterns. The financial performance trend in the district and the regional expansion of Maluku Province in 2010-2013 has various conclusions, but it tends to be stagnant and keep declining. The causes of decline in the financial performance of the division in the district and the regional expansion of Maluku Province in 2010-2013, are the vagueness of the real potential of the region, and the lack of transparency and accountability.

Keywords: asymmetrical condition, financial performance, regional expansion, financial ratios, financial index

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi di Indonesia melahirkan semangat desentralisasi. Konsekuensinya ialah perubahan keempat UUD 1945. Penambahan pasal 18 dalam UUD 1945 tentang pemerintahan daerah menandakan berakhirnya masa pemerintahan Indonesia yang sentralistik dan menjadi awal masa otonomi daerah.

Sudah menjadi keharusan bahwa di era Otonomi banyak wilayah menginginkan pengakuan secara administratif. Pengakuan tersebut tentu berasal dari keinginan untuk hidup mandiri melalui pemekaran daerah (DOB). Niat baik tersebut perlu diapresiasi tinggi sebab Pemekaran wilayah sejatinya merupakan alat percepatan kemakmuran melalui pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, pemekaran dewasa ini telah mengalami distorsi makna, hanya dipahami secara ekstrim sebagai pembagian wewenang beserta tranfer kekayaan pemerintah pusat kepada daerah (bayi yang baru lahir), tidak lagi dipahami sebagai transfer kemandirian daerah. Lebih parahnya pemekaran dipandang sebagai kemerdekaan daerah dari kekangan pemerintah pusat dan bukan lagi kemandirian daerah dalam mempercepat kemakmuran melalui partisipasi daerah.

Selama empat belas tahun otonomi daerah berlangsung, terhitung sejak reformasi bergulir hingga sekarang ini, meskipun

berbagai kemajuan dirasakan, baik dibidang Politik, Sosial Budaya, ekonomi dan keuangan. Kegagalan juga masih banyak terlihat. Salah satunya terjadi dalam bidang ekonomi dan keuangan yaitu berkaitan dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang belum terlihat memuaskan.

Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa hanya 22 persen daerah pemekaran yang berhasil, sisanya 78 persen gagal. Selain itu, Hasil evaluasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri terhadap 57 daerah otonom baru di bawah tiga tahun menunjukkan, penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif. Kegagalan dalam pemekaran daerah tersebut dijadikan salah satu pertimbangan pemerintah melakukan moratorium. (Tenrini, [2013]).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi yang banyak melakukan pemekaran daerah (DOB). Pada awal Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal dilaksanakan yaitu 1 Januari 2001, Maluku hanya terdiri atas 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Hingga tahun 2010, Maluku memiliki 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, direncanakan juga di tahun 2016 bertambah DOB sebanyak 6 wilayah. Jika rencana itu terlaksanan maka total DOB sebanyak 14 (empat belas) Daerah.

Selain banyak melakukan pemekaran provinsi Maluku juga merupakan salah satu daerah yang terindikasi kuat memiliki kinerja keuangan yang buruk. Gambaran

PAD untuk daerah-daerah otonomi baru di Provinsi Maluku digambarkan dalam tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1
PAD Kabupaten/Kota Pemekaran di Maluku (Dalam Ratus ribuan Rupiah)

No.	Kab/ Kota	2010	2011	2012
1.	MTB	22.605	9.173	12.535
2.	Buru	7.957	5.308	8.576
3.	Aru	11.902	24.826	7.677
4.	SBB	2.866	2.456	3.957
5.	SBT	6.184	8.302	10.835
6.	MTB	5.526	6.683	9.271
7.	Buru Selatan	1.442	2.521	2.249
8.	Tual	5.493	7.773	8.444

Sumber: olahan data LHP BPK atas LKPD Provinsi Maluku

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kinerja PAD Kabupaten dan Kota pemekaran Provinsi Maluku tahun 2010 - tahun 2012 sangat rendah dengan *trend* fluktuatif. Rendahnya PAD merupakan cerminan sederhana semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap Dana transfer pemerintah pusat.

Beranjak dari uraian diatas, penelitian ini bermaksud melakukan pencegahan terhadap kondisi asimetris tersebut khususnya di provinsi Maluku, serta difokuskan pada kinerja keuangan delapan kabupaten/kota pemekaran di provinsi Maluku tahun 2010-2013 yang terindikasi memiliki kinerja keuangan sangat rendah, tetapi disisi

lain Pemeritah Provinsi Maluku ingin menambah daerah otonomi baru lain.

1.2 Rumusan Masalah Studi Kasus

Terjadi suatu kondisi asimetris antara Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri dengan Pemerintah Daerah khususnya provinsi Maluku. Disatu sisi Pemeritah Provinsi Maluku ingin menambah daerah otonomi baru, sedangkan, disisi lain hasil evaluasi Kementrian Dalam Negeri menemukan tingginya kegagalan daerah otonomi baru dan provinsi Maluku terindikasi termasuk salah satunya. Untuk mencegah kondisi tersebut maka kinerja keuangan Kabupaten dan Kota pemekaran (DOB) di Provinsi Maluku perlu untuk diukur.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam riset ini adalah

1. Bagaimanakah kinerja keuangan Kabupaten dan Kota pemekaran Provinsi Maluku dalam 4 (empat) tahun terakhir ditinjau dari rasio dan indeks keuangan?
2. Bagaimanakan *trend* kinerja keuangan Kabupaten dan Kota pemekaran provinsi Maluku selama 4 (empat) tahun?
3. Faktor-faktor penyebab penurunan kinerja keuangan kabupaten dan Kota pemekaran provinsi Maluku selama empat tahun?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota pemekaran di Provinsi Maluku dalam empat tahun terakhir ditinjau dari rasio dan indeks keuangan.
2. Bertujuan menilai dan mengetahui *trend* kinerja keuangan daerah-daerah pemekaran di Provinsi Maluku selama empat tahun.
3. Bertujuan mengetahui penyebab penurunan kinerja keuangan daerah-daerah pemekaran tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kinerja

Konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang padanan katanya dalam bahasa inggris disebut *performance* sering diindonesiakan sebagai Performa. Kinerja sejauh ini telah didefinisikan oleh banyak ahli, namun untuk menjaga relevansi, kesederhanaan, dan kemudahan mamahami serta menghindari bias penafsiran terkait kinerja yang dimaksudkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini membatasi definisi kinerja menjadi 5 definisi. Definisi tersebut masing-masing dikemukakan oleh Waldman (1994); Stoner (1996); Robbins (1997); Prowirosentono (2002); Bastian (2006), dan Wirawan (2012). Waldman (1994) mendefinisikan kinerja sebagai

prestasi yang dicapai berdasarkan apa yang diharapkan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam organisasi. Stoner (1996) mendefinisikan kinerja sebagai kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi (dalam Kamal, [2011]). Menurut Robbins (1997) kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh fungsi kinerja atau aktifitas selama periode tertentu (dalam Mawardi, [2002]). Prowirosentono (1999) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma etika. Bastian (2006) mendefinisikan Kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Sedangkan Wirawan (2012) mendefinisikan kinerja sebagai keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu.

Dari beberapa pengertian diatas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kinerja merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan, gambaran prestasi, keluaran hasil kerja yang dicapai oleh fungsi kinerja atau aktifitas seorang atau

kelompok orang dalam suatu organisasi selama periode tertentu yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang bersangkutan, tidak melanggar hukum dan sesuai norma etika.

2.2 Pengertian keuangan daerah

Keuangan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagai perintah teknis dari Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, perintah teknis tersebut diturunkan dari UU 17 2003, UU 1 2004, UU 15 2004, UU 23 2014 jo UU 32 2004, UU 33 2004 yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Secara sederhana pengertian keuangan daerah dikemukakan Jaya (1999) Sebagai seluruh tatanan perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah.

Dari penjelasan hasil uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan, gambaran prestasi hasil kerja bidang keuangan daerah yang dicapai sesuai asas umum keuangan daerah oleh fungsi kinerja atau aktifitas seorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi selama periode tertentu dalam rangka pencapaian sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi yang bersangkutan, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan Norma etika.

2.3 Pengertian Indikator Kinerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Indikator Kinerja didefinisikan sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, serta manfaat, dan atau dampak yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator kinerja dikatakan mengandung spesifikasi kuantitatif jika, indikator tersebut mengandung unsur angka baik berupa angka absolut, presentase, rasio atau indeks, ataupun menyatakan kuantitas sesuatu, jika Sebaliknya maka dikatakan sebagai indikator kualitatif (Noviandri, [2011])

Pentingnya indikator kinerja diungkapkan Mardiasmo (2009) yaitu berperan dalam membantu memperjelas tujuan organisasi, mengevaluasi target akhir, sebagai masukan untuk menentukan skema insentif, menunjukkan standar kinerja, serta membantu menentukan aktifitas yang memiliki efektivitas biaya paling baik dalam mencapai target.

2.4 Rasio Dan Indeks Sebagai Indikator Kinerja Keuangan

Telah banyak indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pemerintah. Beberapa diantaranya seperti Bank Dunia dan Kementerian Dalam Negeri *CAFR Governmental Funds Information*, BAPPENAS

(2003), Mardiasmo (2002), Halim (2014) dan Mahmudi (2010).

Penelitian ini mengemukakan 8 rasio keuangan yang dikemukakan Halim (2014) dan Mahmudi (2010) ditambah dengan IKK yang dikemukakan BAPPENAS (2003) sebagai indikator kinerja keuangan. Sembilan indikator tersebut digunakan dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah. Interpretasi hasil perhitungan rasio keuangan t digunakan sebagai alat evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sembilan rasio keuangan tersebut masing-masing: Rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektifitas PAD, rasio derajat kontribusi BUMD, rasio aktifitas, rasio efisiensi belanja, rasio efektifitas belanja dan IKK.

2.5 Kinerja Keuangan Daerah ditinjau dari Rasio dan Indeks keuangan

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Halim dan Mujib (2009) mengemukakan pada dasarnya gagasan desentralisasi fiskal merupakan mekanisme pendanaan pemerintah sehari-hari berkaitan dengan kebijakan keuangan negara yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap kegiatan perekonomian. Halim melanjutkan, Derajat desentralisasi tersebut dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat

kontribusi PAD terhadap Total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Halim [2014]). Depdagri memformulasikannya dalam Rasio sebagai berikut (lihat depdagri (1991) :

$$DDF = \frac{\text{PAD}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat desentralisasi fiskal
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
Diatas 50,00	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007) membicarakan kergantungan keuangan daerah erat kaitannya dengan kemandirian daerah. Tingkat ketergantungan daerah dicirikan sebagai seberapa mandirikah daerah tersebut. Halim (2014) mengemukakan Rasio ketergantungan keuangan daerah

dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan Transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Depertemen dalam negeri memberikan kriteria penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Ketergantungan
Keuangan Daerah

Persentase PT Terhadap Total Pendapatan Daerah	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
Diatas 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2014) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan cerminan dari kemampuan

pemerintah daerah dalam membiayai dirinya sendiri. Pembiayaan tersebut meliputi kegiatan pemerintahan dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

Semakin tinggi rasio kemandirian tentu mengandung pengertian bahwa semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkat ketergantuan eksternal maka dapat dikatakan semakin membaiknya tingkat kemandirian daerah tersebut. Implikasi lain yang juga dapat dilihat disini yaitu kemandirian mencerminkan kesejahteraan masyarakat, terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah penelitian ini menggunakan rumusan Balitbang Depdagri (1991) sebagai berikut:

$$RKMd = \frac{PAD}{\text{Dana Perimbangan}}$$

Kriteria kemandirian keuangan daerah dikategorikan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian Kemandirian
Keuangan Daerah

Persentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
Diatas 50,00	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

Hubungan kemandirian pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dapat dilihat menggunakan beberapa pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut *Paul Hersey* dan *Kenneth Branchard* (dalam Halim 2001) Pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut:

- 1) Pola Instrukturif, berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 2) Pola Konsultatif, berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa daerah sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah
- 3) Pola Partisipatif, berarti peran pemerintah pusat sudah mulai

berkurang karena tingkat kemandirian daerah sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.

- 4) Pola Delegasi, berarti sudah tidak ada campur tangan pemerintah pusat. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah telah mampu secara mandiri melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Dari penjelasan diatas pola hubungan tersebut lebih rinci dapat digambarkan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pola Hubungan dan tingkat
Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian %	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0-25	Instrukturif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Halim (2007: 169)

4. Rasio Efektifitas PAD

Menurut Halim (2014) rasio efektifitas dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Utama (2008) mengemukakan Rasio efektifitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah. Untuk

menghitung tingkat efektifitas PAD menggunakan rumusan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target PAD berdasarkan potensi rill daerah}} \times 100\%$$

Depdagri merumuskan kriteria Nilai efektifitas PAD dalam tabel 2.5 sebagai berikut (Munir et al, [2005]):

Tabel 2.6
Kriteria Penilaian efektifitas PAD

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
Di Atas 100%	Sangat efektif
90% - 100%	efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

5. Derajat kontribusi BUMD

Mahmudi (2010) mengemukakan Rasio kontribusi BUMD bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total pendapatan asli daerah. Rasio DKB dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{DKB} = \frac{\text{Penerimaan bagian laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

6. Rasio Keserasian Belanja

Menurut Halim (2014) rasio keserasian merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin kecil persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasaran ekonomi masyarakat berarti persentase Dana yang dialokasi untuk belanja rutin semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Secara sederhana rasio keserasian dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{RBI Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Investasi}}{\text{Total APBD}}$$

7. Rasio Efisiensi Belanja

Mahmudi (2010) mengemukakan rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antaran realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat

penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi tidak absolut tetapi relatif, Artinya tidak ada standar baku yang dianggap mutlak untuk rasio ini, tetapi hanya dapat mengatakan belanja periode ini lebih efisien dibandingkan dari periode lalu. Formulasi dari rasio ini sebagai berikut:

$$REB = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian efisiensi belanja secara tegas digambarkan dalam tabel 2.6 sebagai berikut.

Tabel 2.7
Kriteria Penilaian Efisiensi Belanja

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
Lebih dari 100%	Tidak Efisien
Antara 90% - 100%	Kurang Efisien
Antara 80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
dibawah 00%	Sangat Efisien

Sumber: Kep. Mendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

8. Rasio Efektifitas Belanja

Mahmudi (2010) mengemukakan rasio belanja daerah terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktifitas dan efektifitas belanja daerah. Adapun rumusannya sebagai berikut:

$$REfB = \frac{\text{Total RBD}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$

Kriteria penilai efektifitas belanja secara jelas diuraikan dalam tabel 2.7 sebagai berikut.

Tabel 2.8
Kriteria Penilaian Efektifitas Belanja

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
Antara 90% - 100%	Efektif
Antara 80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
dibawah 60%	tidak Efektif

Sumber: Kep. Mendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

9. Indeks kemampuan keuangan daerah (IKK)

Indeks kemampuan keuangan dipahami sebagai rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (*growth*), indeks elastisitas, dan indeks *share*. Dimana, *growth* merupakan angka pertumbuhan PAD tahun *i* dari tahun *i-1*, elastisitas diartikan sebagai rasio PAD terhadap Belanja Langsung, bertujuan melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah, dan *share* dipahami sebagai cerminan rasio PAD terhadap belanja tidak langsung dan belanja langsung, guna mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan daerah membiayai membiayai kegiatan Belanja serta melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah, (Bisma dan Susanto [2010]). Indeks kemampuan keuangan (IKK) dihitung menggunakan dua model yaitu:

1. IKK berdasarkan metode Kuadran
 IKK berdasarkan Metode kuadran dihitung menggunakan ukuran *share* dan ukuran *growth* PAD, selanjutnya diklasifikasikan kedalam peta kuadran. Analisis *share* dan *growth* digambarkan sebagai berikut:

$$Share = PAD / \text{Total Belanja} \times 100\%$$

$$Growth = (PAD_i / PAD_{i-1}) \times 100\%$$

Keterangan: $PAD_i = PAD$
 Periode i
 $PAD_{i-1} = PAD$
 Periode $i-1$

Pengklasifikasian serta pemetaan keuangan berdasarkan metode sesuai ukuran *Share* dan *Growth* PAD sebagaimana dimaksudkan digambarkan sebagai berikut.

Rata-rata *GROWTH* (%)

KUADRAN I <i>Share</i> : Rendah <i>Growth</i> :Tinggi	KUADRAN II <i>Share</i> :Tinggi <i>Growth</i> : Tinggi
KUADRAN II <i>Share</i> : Rendah <i>Growth</i> :Rendah	KUADRAN III <i>Share</i> :Tinggi <i>Growth</i> :Rendah

Sumber: Bappenas (2003)

Gambar 2.1
 Peta Kuadran

Kualifikasi status kemampuan keuangan dalam peta kuadran lebih jelasnya digambarkan dalam tabel 2.8 sebagai berikut.

Tabel 2.9
 Kualifikasi Status Kemampuan Keuangan BerdasarkanMetoda Kuadran

K	KONDISI
I	Gambaran Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam total belanja, dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal.
II	Gambaran kondisi belum ideal, tetapi daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam total belanja.
III	Kondisi ini menggambarkan belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PAD nya kecil.
IV	Peran Yang Besar Dalam Total Belanja, Dan Daerah Belum Mempunyai Kemampuan Mengembangkan Potensi Lokal.

Sumber: Bappenas (2003)

2. IKK Berdasarkan Kriteria Indeks kemampuan keuangan (IKK) berdasarkan kriteria dibangun atas tiga komponen yakni komponen *share*, *growth*, dan elastisitas.

Perbedaan IKK berdasarkan Metode kuadran dan IKK berdasarkan kriteria Selain pada pola kuadran dan kriteria juga terletak pada unsur elastisitas. Adapun, untuk menyusun setiap komponen IKK dilakukan dengan menggunakan persamaan umum sebagai berikut:

$$\text{Indeks X} = \frac{\text{Nilai x Hasil Pengukuran} - \text{Nilai x Kondisi Minimum}}{\text{Nilai x Kondisi Maksimum} - \text{Nilai x Kondisi Minimum}}$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka formulasi IKK dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{IKK} = (\text{XG} + \text{XE} + \text{XS}) / 3$$

Dimana:

- XG = Indeks Pertumbuhan (PAD),
- XE = Indeks Elastisitas (Belanja Langsung Terhadap PAD),
- XS = Indeks *Share* (PAD terhadap APBD)

Keterangan:

- Indeks PAD (*Growth*) = Jumlah Indeks / n tahun
- Indeks Elastisitas = Jumlah Indeks / n
- Indeks *Share* = Jumlah Indeks / n tahun

Kriteria Tingkat kemampuan keuangan daerah sebagaimana diuraikan Bappenas (2003) dapat

digambarkan dalam tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00 - 0,33	Rendah
0,34 - 0,43	Sedang
0,44 - 1,00	Tinggi

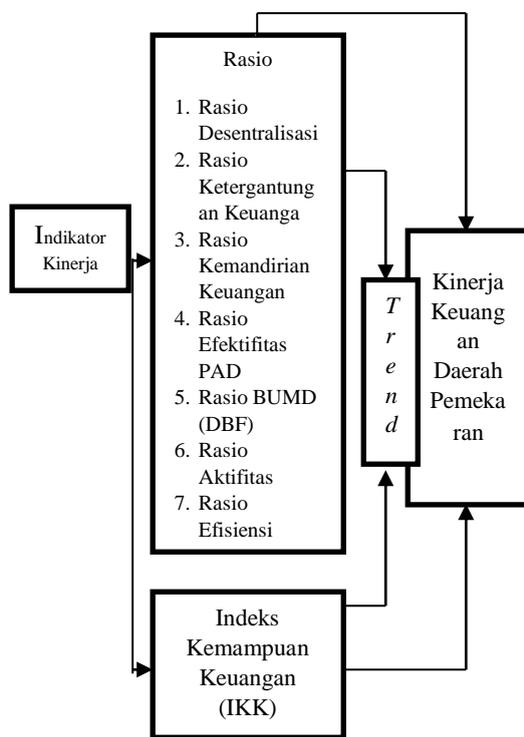
Sumber: Bappenas 2003

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian Samah (2002) mengukur kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi tengah dalam rangka mengetahui tingkat perkembangan APBD dan PAD serta tingkat efektifitas penerimaan daerah, efisiensi pengeluaran rutin dan juga tingkat kemandirian keuangan. Penelitian Soamole (2010) Mengevaluasi aspek keuangan kabupaten pemekaran daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Studi pada kabupaten Halmahera tengah. Penelitian Susanto dan Bisma (2010) mengevaluasi kinerja keuangan daerah pemerintahan provinsi nusa tenggara barat.

2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibentuk berdasarkan kerangka pemikiran sebagai berikut



Gambar 2.2
Struktur Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus pada delapan daerah hasil pemekaran di provinsi maluku. Creswell (2010) mendefinisikan metode studi kasus sebagai strategi penelitian dengan menyelidiki secara cermat suatu aktifitas, program, peristiwa, proses, maupun sekelompok individu.

3.2 Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, dan sebaliknya data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Cooper dan Schindler (2014) mendefinisikan kedua data tersebut masing-masing yaitu: data primer adalah data mentah yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian serta data tersebut belum terinterpretasi dari pihak lain. Data sekunder adalah data yang telah interpretasikan oleh pihak lain dan diberikan kepada pihak kedua.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data. Pertama, bersumber dari laporan keuangan APBD kabupaten/kota pemekaran Provinsi Maluku hasil pemeriksaan BPK wilayah maluku dan Badan Pusat Statistik (BPS). kedua bersumber dari hasil wawancara dengan SKPD-SKPD pemekaran yang menjadi sampel. Wawancara difokuskan untuk memperoleh data terkait penurunan kinerja pada item-item yang menjadi indikator kinerja. Empat daerah sampel daerah dipilih berdasarkan kinerja terendah. Sampel SKPD dibatas/difokuskan pada BPPKAD dan Dinas Pendapatan Daerah dari total SKPD yang ada didaerah masing-masing.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain: teknik wawancara. Moleong (2007) mengemukakan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan *face to face* dengan pihak terkait, bentuk wawancara

semiterstruktur. Cooper dan Schiderlin (2014) mendefinisikan wawancara semiterstruktur sebagai wawancara yang mulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan terstruktur setelah itu dilanjutkan dengan pertanyaan spesifik sesuai dengan karakteristik yang di wawancarai. Sedangkan, Teknik pengumpulan data sekunder melalui pengumpulan data arsip hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan keuangan APBD pemerintah daerah. Menurut Hortono (2013) Strategi arsip merupakan teknik pengumpulan dari basis data. Basis data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan data kinerja keuangan daerah.

3.3 Analisis Data

Analisis data secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk mengelola atau merubah data menjadi informasi. Upaya tersebut membentuk teknik Analisis data. Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data yaitu analisis deskriptif untuk menganalisis data sekunder. dan Teknik analisis data kualitatif (model Miles dan Haberman, 1998) untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari hasil wawancara.

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif diartikan sebagai suatu proses mendeskripsikan atau menggambarkan data sebagaimana adanya menjadi informasi dalam menjelaskan suatu fenomena. Analisis dekriptif digunakan menganalisis data sekunder dengan

mengukur kineja keuangan menggunakan indikator kinerja keuangan rasio dan indek keuangan.

2. Analisis Data kualitatif (model Miles dan Haberman 1998)

Miles dan Haberman (1998) mengemukakan tiga tahap yang dapat dilakukan dalam menganalisis data wawancara. Pertama. Reduksi data. Sugiyono (2014) mendefinisikan reduksi data sebagai aktifitas menyederhanakan data, merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada poin-poin penting serta mengkategorisasikan data sesuai jenisnya. Dalam proses reduksi data, peneliti menggunakan analisis tematik. Menurut Braun dan Clarke, (2006) metode analisis berguna untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyajikan pola (tema) yang terdapat dalam data. kedua. Penyajian data, menurut Braun dan Clarke (2006)) penyajian data kualitatif berbentuk penyajian teks bersifat naratif, berbentuk uraian singkat atau sejenisnya. dan ketiga. Kesimpulan atau Verifikasi data (dalam Sugiyono, 2014).

3.4 Pengujian Data

Menurut Moleong (2013), dan Sugiyono (2014) keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas). Untuk menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan empat kriteria pengujian masing-masing uji *credibility*, yaitu dengan triangulasi. uji *transferability*, *dependability*, dan *Confirmability*.

HASIL PENELITIAN

4.1 Analisis kinerja keuangan Kabupaten/Kota pemekaran Provinsi Maluku tahun 2010-2013

1. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal daerah-daerah pemekaran di provinsi maluku tahun 2010-2013 hanya berada pada kisaran 0.01 hingga 0.03, dengan rata-rata per tahun 0.02. dengan kata lain kinerja keuangan ditinjau dari DDF daerah daerah pemekaran di provinsi Maluku dikategorikan sangat kurang.

Dari hasil wawancara kepala bidang pendapatan BPPKAD Kabupaten SBB ditemukan kendala atau menyebabkan rendahnya kinerja Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten SBB antara lain: terkendala pada keterbatasan regulasi, minimnya SDM, kurangnya sosialisasi dan serta sarana dan prasarana, Kurangnya perhatian dan tanggungjawab pegawai pajak dan Kurangnya kesadaran wajib pajak.

2. Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah kabupaten/kota pemekaran Maluku selama 2010-2013 sangat tinggi, yaitu 89% sampai dengan 99% dengan rata-rata per tahun 95%.

Tingginya ketergantungan keuangan daerah-daerah pemekaran di provinsi Maluku sebagaimana tergambar diatas akibat dari rendahnya upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kendala-kendala pemungutan pajak dan retribus. Dari

hasil wawancara ditemukan bahwa jenis pendapatan asli daerah yang menjadi pemasok utama PAD hanyalah pajak dan retribusi, sedangkan untuk jenis lainnya seperti kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak ada.

3. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Kinerja kemandirian keuangan daerah pemekaran provinsi Maluku tahun 2010-2013 sangat rendah yaitu 1% - 4%, dengan rata-rata pertahun 5%. Pola hubungan kemandirian kabupaten/kota pemekaran provinsi Maluku tahun 2010-2013 instruktif.

Dari hasil wawancara dengan beberapa daerah-daerah pemekaran seperti Kabupaten Buru, Kabupaten SBB, Kabupaten Buru Selatan, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru. Terlihat bahwa kendala yang dihadapi pemerintah daerah-daerah pemerakaran diprovinsi Maluku rata-rata bisa dikatakan sama yaitu antara lain: Keterbatasan Regulasi; Minimnya SDM; dan Kurangnya sosialisasi, Kurangnya Koordinasi; Lemahnya administrasi dan Ketidakjelasan Potensi rill, Kurangnya ketegasan, Kurannya sarana dan prasaran dan Kurangnya perhatian dan tanggungjawab pegawai pajak, serta Kurangnya kesadaran wajib pajak.

4. Analisis Efektifitas PAD

Efektifitas PAD kabupaten/ kota pemekaran provinsi Maluku tahun 2010-2013 berfariasi pada sangat efektif, efektif, cukup efektif dan efektif, dengan rata-rata pertahun

efektif. Kabupaten MTB, Kepulauan Aru, SBT, MBD dan kota Tual tingkat kinerja sangat efektif yaitu diatas 100%. Kabupaten Buru Selatan efektif, kabupaten Buru Kurang efektif, dan Kabupaten SBB tidak efektif yaitu 60%.

Rendahnya efektifitas PAD kabupaten SBB disebabkan oleh berbagai kendala teknis yang terjadi. Pertama, masih kurangnya SDM khususnya pemungutan pajak kabupaten SBB. Kedua, kurangnya kesadaran wajib pajak akibat kurangnya sosialisasi. Ketiga, Kurangnya perhatian dan rasa tanggungjawab petugas pajak akibat lemahnya pembinaan serta belum adanya kebijakan *reward* dan *panishment*. Keempat, kurangnya sarana dan prasaran pendukung akibat dari lemahnya perencanaan. Kelima, regulasi yang tidak lengkap. Keenam semua objek pajak dan retribusi belum di tata kelola secara baik. Dan ketujuh lemahnya evaluasi bagi SKPD penghasil PAD Kabupaten SBB.

5. Analisis Derajat Kontribusi BUMD

Kontribusi BUMD terhadap PAD kabupaten/kota pemekaran diprovinsi Maluku tahun 2010-2013 yaitu pada kisaran 1% sampai dengan 6%, dengan rata-rata pertahun 0.02. Kontribusi BUMD terendah Kota Tual yaitu 0.01. Kontribusi tertinggi Kabupaten Buru Selatan yakni 0.06. Sedangkan Kontribusi BUMD daerah-daerah lainnya hanya berkisar 2% sampai 5%.

Dari hasil wawancara Penyebab utama rendahnya kontribusi BUMD

ini bukan dikarenakan oleh BUMD yang merugi, namun belum adanya BUMD yang memiliki orientasi Laba di daerah serta Jumlah BUMD yang terbatas.

Kondisi demikian terjadi rata-rata pada semua daerah pemekaran di provinsi Maluku yaitu rendahnya jumlah BUMD, belum berorientasi profit, dan fokus utama pendapatan asli hanya pada jenis pajak dan retribusi dan untuk kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan di daerah hanya mengandalkan PT.PDAM serta PT BPDAM.

6. Analisis Keserasian Belanja

1. Analisis Belanja Rutin

Kontribusi belanja rutin kabupaten/kota pemekaran provinsi Maluku selama tahun 2010-2013 yaitu terjadi pada kisaran 59% sampai dengan 76%, dengan rata-rata per tahun 69%. Belanja rutin tertinggi kabupaten Buru yaitu 76%, sedangkan terendah kabupaten Buru Selatan yaitu 59%.

Dari hasil wawancara Bagian PPKD Kota Tual menjelaskan bahwa belanja rutin kota Tual meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan rendahnya SDM, sehingga melalui belanja rutin tersebut pemerintah kota Tual Berupaya meningkatkan kapasitas SDM daerah. Pemerintah kota Tual juga menambahkan bahwa tinggi rendahnya belanja dari tahun ke tahun dilakukan sesuai kebutuhan daerah.

2. Analisis Belanja Investasi

Kinerja belanja investasi kabupaten/kota pemekaran provinsi Maluku tahun 2010-2013 yaitu berkisar 20% sampai 36% dengan

rata-rata per tahun 28%. Kabupaten kepulauan Aru melakukan Belanja Investasi terendah yaitu 20%. Sedangkan, kabupaten Buru Selatan tertinggi yaitu 36%.

Dari hasil wawancara belanja investasi Kabupaten Kepulauan Aru, kepala bidang perbendaharaan BPPKAD mengungkapkan dua penyebab utama rendahnya belanja investasi Kabupaten Kepulauan Aru. Pertama, lamanya waktu proses lelang, sehingga penyerapan anggaran belanja investasi selalu terjadi di akhir tahun anggaran bahkan ditunda dan juga berdampak pada pendeknya waktu penyelesaian proyek. Kedua, kondisi cuaca. Kondisi cuaca sangat mempengaruhi tinggi rendahnya belanja investasi umumnya daerah-daerah kepulauan dan khususnya di kepulauan Aru. Selain lamanya waktu lelang dan faktor cuaca, kendala yang sering terjadi dalam penyerapan anggaran belanja investasi kabupaten/kota provinsi Maluku tahun 2010-2013 dalam hal ini daerah-daerah kepulauan yaitu sengketa lahan.

7. Analisis Efisiensi Belanja

Kebijakan efisiensi belanja kabupaten/kota pemekaran provinsi Maluku tahun 2010-2013 berada pada tiga kisaran bervariasi yaitu efisien, cukup efisien dan efisien, dengan rata-rata per tahun 0.86 atau cukup efisien. Tiga daerah pemekaran berada pada kisaran kurang efisien dengan skala 90% sampai 100%, masing-masing; kabupaten Buru, SBB, dan Buru Selatan. Kabupaten SBT efisien yaitu 76%. Sedangkan empat daerah

Lainnya berada pada kinerja yang cukup efisien.

Meskipun dalam penjelasan diatas digambarkan bahwa belanja investasi dan belanja rutin terlihat hanya pada kisaran 20-36 persen dan 59-76 persen, namun tidak memberi cerminan bahwa efisiensi tercapai, sebab rendahnya realisasi kedua belanja tersebut dikarenakan terdapat berbagai kendala.

8. Analisis Efektifitas Belanja

Kinerja efektifitas belanja kabupaten/kota pemekaran provinsi Maluku tahun 2010-2013 bervariasi pada tiga kisaran yaitu sangat efektif, cukup efektif dan Kurang efektif, dengan rata-rata per tahun 0.92 atau efektif. Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan kabupaten SBB kurang efektif yaitu 0.65 dan 0.71, Kabupaten kepulauan Aru, MBD dan kota Tual Cukup efektif yaitu 0.83, 0.88, dan 0.84. Kabupaten Buru, SBT dan Buru sangat efektif yaitu lebih dari 100%.

Kurang efektifnya kinerja belanja daerah di DOB provinsi Maluku tahun 2010-2013 tidak diakibatkan oleh rendahnya belanja langsung ataupun tidak langsung daerah. Sebab dari penjelasan sebelumnya kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru, kabupaten MBD memiliki aktifitas belanja investasi terendah namun dari sisi efektifitas belanja terlihat cukup efektif. Daerah-daerah dengan Belanja rutin terendah seperti Kabupaten Buru selatan, Kota Tual, kabupaten MBD dan kabupaten SBT, juga memiliki efektifitas belanja cukup hingga sangat efektif.

Rendahnya belanja rutin dan belanja investasi terhadap total belanja bebarapa daerah kabupaten/kota pemekaran provinsi Maluku tahun 2010-2013 sebagaimana dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala penghambat aktifitas belanja daerah-daerah tersebut, tetapi jika dibandingkan lagi dengan efektifitas belanja yang dilakukan maka dapat dikatakan bahwa meskipun belanja daerah rendah tetapi belanja tersebut efektif berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Tidak efektifnya belanja Kabupaten MTB tahun 2010-2013 berbanding terbalik dengan tingginya belanja rutin dan belanja investasi dilakukan yaitu 72% untuk belanja rutin dan 35% belanja Investasi. Dengan kata lain tingginya aktifitas belanja Kabupaten MTB di tahun 2010-2013 belum berkontribusi secara efektif terhadap pembangunan daerah.

Rendahnya aktifitas belanja dan tidak efektifnya belanja Kabupaten SBB tahun 2010-2013 menunjukkan bahwa kontribusi belanja daerah Kabupaten SBB tahun 2010-2013 rendah dan tidak efektif terhadap pembangunan daerah.

9. Analisis Indeks kemampuan keuangan daerah (IKKD)

1. Analisis IKK model kriteria

Indeks kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota provinsi Maluku tahun 2010-2013 yaitu berada pada kisaran 0.40 (sedang) sampai dengan 0.51 (tinggi). Kabupaten Buru Selatan memiliki

IKK tertinggi yaitu 0.51, IKK terendah Kabupaten SBB yaitu 0.40, Kabupaten Kepulauan Aru 0.41, Kabupaten MBD 0.44, Kabupaten SBT 0.45, Kabupaten MTB 0.46, Kota Tual 0.47, dan Kabupaten Buru 0.48. Dengan kata lain seluruh daerah memiliki kemampuan keuangan yang menunjang pembangunan daerah.

2. Analisis IKK model kuadran

Indeks kemampuan keuangan model kuadran kabupaten/kota pemekaran Maluku tahun 2010-2013 terdapat dalam tiga ruas kuadran yaitu kuadran II, kuadran III, dan kuadran IV, selengkapnya dipetakan dalam gambar 6.1 sebagai berikut.

Rata-rata *GROWTH* (%)

KUADRAN I Kep. Arus Seram Barat MBD	KUADRAN II
KUADRAN II Seram Timur	KUADRAN III MTB Buru Buru Selatan Tual

Sumber: diolah dari Buku I LHP LKPD Daerah Pemekaran Provinsi Maluku

Gambar 6.1
Peta kuadran daerah-daerah Pemekaran Provinsi Maluku Tahun 2010-2013

Berdasarkan gambar 6.1 peta kemampuan keuangan daerah-daerah pemekaran provinsi Maluku tahun 2010- 2014, kabupaten yang berada pada kuadran II yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, SBB dan MBD. Kuadran II menunjukkan gambaran kondisi keuangan daerah belum ideal. Tetapi, daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam total belanja. Dengan kata lain Sumbangan PAD terhadap total belanja masih rendah namun pertumbuhan (growth) PAD tinggi.

Kabupaten MBT, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan dan Kota Tual berada dalam kuadran III. Kuadran III menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah ini belum ideal. Peran PAD yang besar dalam total belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah. Dengan kata lain besarnya kontribusi PAD terhadap belanja daerah mengharuskan Pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah peningkatan pertumbuhan PAD. Sedangkan Kabupaten SBT berada dalam kuadran IV. Kuadran IV menggambarkan bahwa peran PAD SBT yang besar dalam total belanja namun Daerah Belum Mempunyai Kemampuan Mengembangkan Potensi Lokal. Dengan kata lain Sumbangan PAD Terhadap Total Belanja Dan Pertumbuhan PAD SBT yang diharapkan sangat Rendah.

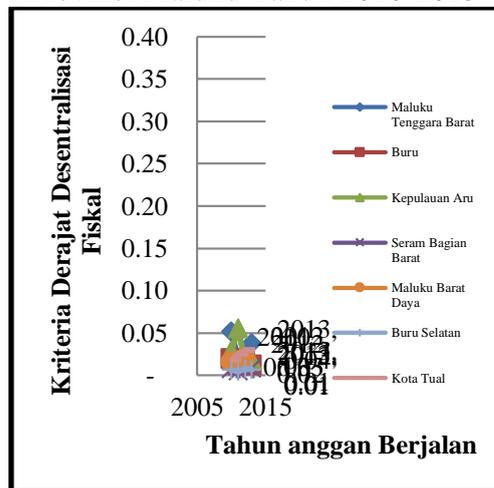
4.2 *Trend* kinerja keuangan Kabupaten dan Kota Pemekaran Provinsi Maluku selama 4 (empat) tahun

1. *Trend* Derajat Desentralisasi Fiskal

Trend DDF daerah-daerah pemekaran di provinsi Maluku tahun 2010-2013 digambarkan dalam grafik 6.1 sebagai berikut.

Grafik 6.1

Trend Kinerja Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah-daerah Pemekaran Provinsi Maluku Tahun 2010-2013



Sumber: diolah dari Buku I LHP LKPD Daerah Pemekaran di Provinsi Maluku

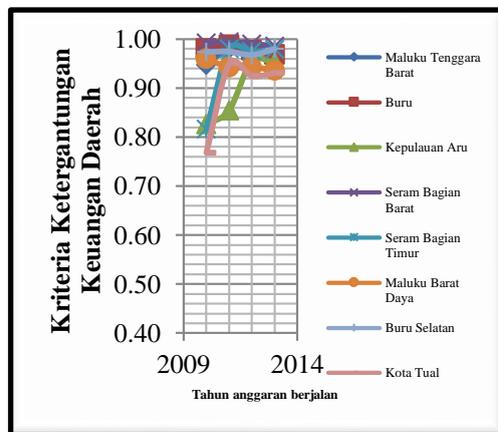
Berdasarkan grafik 6.1 *Trend* kinerja DDF daerah-daerah pemekaran Provinsi Maluku tahun 2010-2013 yaitu stagnan, meningkat dan menurun dibawah 6%, dengan kata lain kinerja DDF Kabupaten/kota provinsi Maluku sangat kurang. Tahun 2010 hingga tahun 2013 kinerja DDF kabupaten/kota pemekaran provinsi Maluku masih dibawah 10%.

2. *Trend Ketergantungan Keuangan Daerah*

Trend ketergantungan keuangan daerah kabupaten/kota provinsi Maluku tahun 2010-2013 bervariasi yaitu menurun, meningkat, stagnan dan fluktuatif. selengkapnya diuraikan dalam grafik 6.2 sebagai berikut.

Grafik 6.2

Trend Kinerja Ketergantungan Keuangan Daerah-daerah Pemekaran Provinsi Maluku Tahun 2010-2013

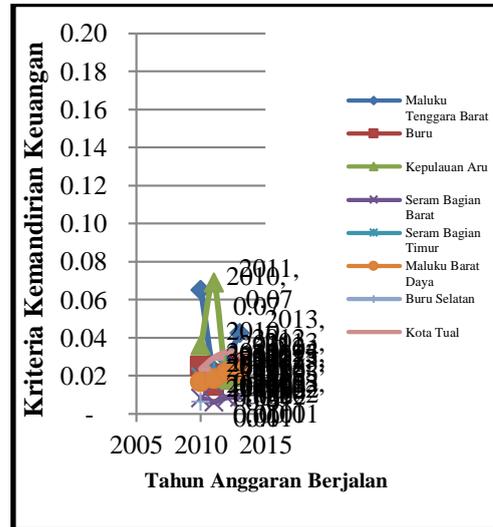


Sumber: diolah dari Buku I LHP LKPD Daerah Pemekaran di Provinsi Maluku

3. *Trend Kemandirian Keuangan Daerah*

Trend KKD delapan daerah pemekaran provinsi Maluku tahun 2010-2014 yaitu fluktuatif dan stagnan dibawah 8%, kondisi ini menunjukkan rendahnya upaya pemerintah mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat. selengkapnya digambarkan dalam grafik 6.3 sebagai berikut.

Grafik 6.3
Trend Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah-daerah Pemekaran Provinsi Maluku Tahun 2010-2013

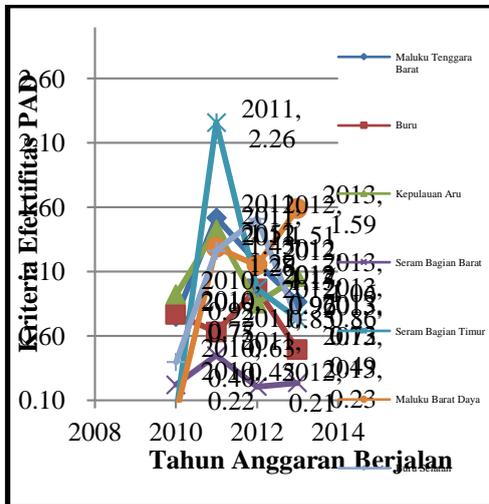


Sumber: diolah dari Buku I LHP LKPD Daerah Pemekaran di Provinsi Maluku

4. *Trend Efektifitas PAD*

Trend efektifitas PAD delapan daerah pemekaran provinsi Maluku tahun 200-2014 yaitu fluktuatif dan menurun. digambarkan dalam grafik 6.4 sebagai berikut.

Grafik 6.4
Trend Kinerja Efektifitas PAD
Daerah-daerah PemekaranProvinsi
Maluku Tahun 2010-2013

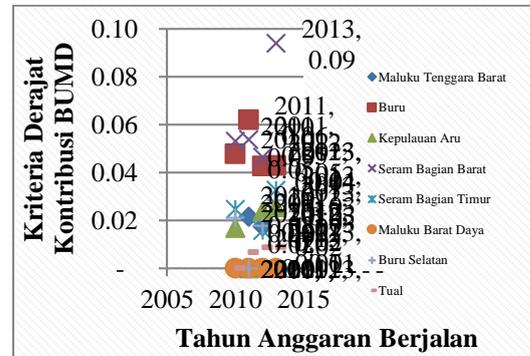


Sumber: diolah dari Buku I LHP
LKPD Daerah Pemekaran di Provinsi
Maluku

5. Trend Derajat Kontribusi BUMD

Trend derajat kontribusi BUMD delapan daerah pemekaran provinsi Maluku tahun 2010-2013 yaitu menurun, stagnan dan meningkat dibawah 9%. Selengkapnya digambarkan dalam grafik 6.5 sebagai berikut.

Grafik 6.5
Trend Kinerja Derajat Kontribusi
BUMD Daerah-daerah Pemekaran
Provinsi Maluku Tahun 2010-2013



Sumber: diolah dari Buku I LHP
LKPD Daerah Pemekaran di Provinsi
Maluku.

6. Trend Keserasian Belanja

1. Trend Belanja Rutin

Trend belanja rutin daerah-daerah pemekaran provinsi Maluku tahun 2010-2013 yaitu fluktuatif dan menurun.

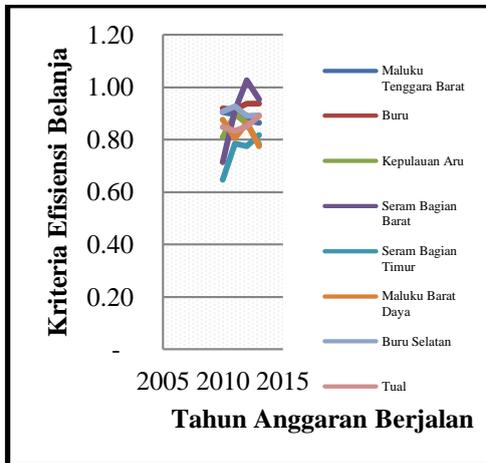
2. Trend Belanja Investasi

Trend belanja investasi daerah-daerah pemekaran provinsi Maluku tahun 2010-2013 yaitu fluktuatif dan menurun.

7. Trend Efisiensi Belanja

Trend efisiensi belanja kabupaten/kota pemekaran provinsi Maluku tahun 2010-2013 Maluku yaitu fluktuatif dan menurun. Selengkapnya digambarkan dalam grafik 6.8 sebagai berikut.

Grafik 6.6
Trend Kinerja Efektifitas Belanja Daerah-daerah Pemekaran Provinsi Maluku Tahun 2010-2013

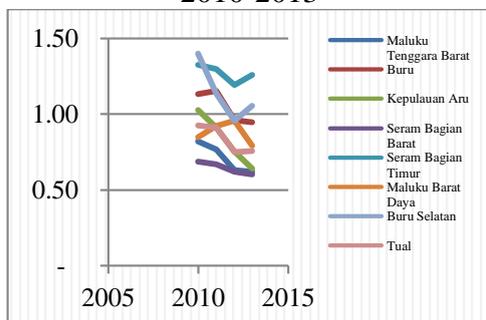


Sumber: diolah dari Buku I LHP LKPD Daerah Pemekaran di Provinsi Maluku.

8. Trend Efektifitas Belanja

Trend efektifitas belanja kabupaten/kota pemekaran provinsi Maluku tahun 2010-2013 yaitu fluktuatif dan menurun. Selengkapnya digambarkan dalam grafik 6.9 sebagai berikut.

Grafik 6.7
Trend Efektifitas Daerah-daerah Pemekaran Provinsi Maluku Tahun 2010-2013

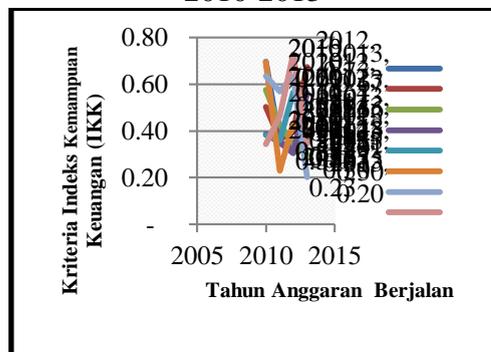


Sumber: diolah dari Buku I LHP LKPD Daerah Pemekaran di Provinsi Maluku

9. Trend Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKKD)

Trend IKK model kriteria kabupaten/kota pemekaran provinsi Maluku tahun 2010-2013 yaitu fluktuatif dan menurun. Selengkapnya digambarkan dalam grafik 6.10 sebagai berikut.

Grafik 6.8
Trend Kinerja IKK Daerah-daerah Pemekaran Provinsi Maluku Tahun 2010-2013



Sumber: diolah dari Buku I LHP LKPD Daerah Pemekaran di Provinsi Maluku

SIMPULAN, REKOMENDASI, DAN KETERBATASAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian VI, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Kabupaten dan Kota pemekaran provinsi Maluku tahun 2010-2013 ditinjau dari rasio dan indeks keuangan disimpulkan sebagai berikut;
 1. Derajat desentralisasi fiskal sangat rendah;
 2. Rasio ketergantungan keuangan sangat tinggi;

3. Rasio kemandirian keuangan sangat rendah. Pola hubung instruktif;
 4. Rasio efektifitas PAD kurang efektif, cukup efektif, efektif dan sangat efektif;
 5. Derajat kontribusi BUMD sangat rendah;
 6. Rasio keserasian belanja, belanja rutin pada kisaran 59% sampai dengan 76%, dengan rata-rata per tahun 69%, belanja investasi pada kisaran 20% sampai 36% dengan rata-rata per tahun 28%;
 7. Rasio efisiensi belanja; efisien, cukup efisien dan kurang efisien;
 8. Rasio efektifitas belanja kurang efektif, cukup efektif dan sangat efektif;
 9. Indeks kemampuan keuangan model kriteria tinggi dan sedang;
 10. Indeks kemampuan keuangan Model kudran yaitu Kudran II, Kuadran III dan Kuadran IV.
2. *Trend* kinerja keuangan Kabupaten dan Kota pemekaran provinsi Maluku tahun 2010-2013 disimpulkan sebagai beritu:
2. *Trend* kinerja DDF stagnan, meningkat dan menurun dibawah 6%;
 3. *Trend* kinerja ketergantungan keuangan menurun, meningkat, stagnan dan fluktuatif;
 4. *Trend* kinerja kemandirian keuangan fluktuatif dan stagnan bawah 8%
 5. *Trend* efektifitas PAD fluktuatif dan menurun.
 6. *Trend* Derajat kontribusi BUMD menurun, stagnan dan meningkat.
 7. *Trend* keserasian belanja; Belanja rutin fluktuatif dan meningkat, sedangkan belanja Investasi fluktuatif, dan menurun;
 8. *Trend* Efisiensi Belanja fluktuatif dan menurun.
 9. *Trend* Efektifitas Belanja fluktuatif dan menurun
 10. *Trend* IKK fluktuatif dan menurun.
3. Faktor-faktor penyebab penurunan kinerja keuangan Kabupaten dan Kota pemekaran di provinsi Maluku tahun 2010-2013 antara lain:
1. Terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalnya kontribusi Pendapatan Asli daerah. Kendala-kendala tersebut antara lain:
 - a. Pendapatan masyarakat rendah, Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat, Ketidakjelasan Potensi rill daerah, Tidak tersediannya data Base wajib pajak, Ketidakpercayaan (*Disstrus*) masyarakat dengan petugas, dan Kurangnya ketegasan

- pemerintah dalam memberikan sanksi atau belum taat terhadap Pelaksanaan Regulasi.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, Tingginya biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima, Kurangnya Koordinasi antara pemerintah provinsi dan daerah serta belum transparannya informasi pendapatan bagi hasil.
 - c. Minimnya SDM terkait bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah, Lemahnya administrasi, Kurangnya pelatihan dan bimbingan kepada petugas, Kurangnya sarana dan prasarana di daerah.
 - d. Keterbatasan Regulasi/regulasi tidak lengkap, Kurangnya evaluasi/belum adanya evaluasi pada SKPD penghasil PAD atas peyeteroran pendapatan, Belum transparannya informasi pengelolaan kekayaan daerah.
 - e. Kurangnya kesadaran lembaga peyeteror pajak, Lemahnya koordinasi antar lembaga pelayanan pajak, dan Belum adanya pengawasan daerah.
2. Terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalnya kontribusi Belanja Daerah. Kendala-kendala tersebut antara lain:
 - a. Lemahnya upaya penyelesaian sengketa lahan, Kurangnya SDM yang ahli dalam pengelolaan keuangan, Kurangnya koordinasi antar lembaga/kurangnya transparansi antar SKPD,
 - b. Kurangnya Transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan pemerintah daerah
 - c. Hambatan regulasi.
 - d. Hambatan faktor iklim.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu keterbatasan isi dan keterbatasan teknis.

1. Keterbatasan Isi

Keterbatasan isi penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua SKPD pengelola PAD dan Belanja sebagai sampel wawancara. Sedangkan, terdapat 12 SKPD pengelola PAD

sekaligus pengguna anggaran di masing-masing daerah pemekaran provinsi Maluku.

2. Waawancara hanya dilakukan di 4 daerah pemekaran dari total 8 daerah Pemekaran di Provinsi Maluku.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tahun anggaran tahun 2010-2013 diperlukan tahun anggaran yang lebih terbaru yaitu 2014.

2. Keterbatasan Teknis

Tidak kooperatifnya sebagian informan, sehingga memperlambat penelitian dan memberikan keterbatasan informasi bagi Penelitian ini.

3. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan sebagaimana uraian diatas, rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten dan Kota pemekaran provinsi Maluku, Gubernur provinsi Maluku, dan Kementerian dalam Negeri, antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi kepada Bupati/Walikota

Berdasarkan hasil penelitian terdapat banyak kendala yang memperlambat kinerja keuangan daerah pemekaran, sehingga Bupati/Walikota perlu menginstuksikan perbaikan-perbaikan, yaitu:

1. Membuka lapangan usaha dalam hal ini UMKM guna meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Menginstruksikan kepada jajaran pemerintahan agar taat

terhadap pelaksanaan pegulasi, dan menindak tegas jika terjadi pelanggaran.

3. Menginstruksikan kepada kepala SKPD-SKPD penghasil PAD untuk meningkatkan sosialisasi terhadap pentingnya kontribusi pajak dan retribusi di daerah dengan begitu diharapkan dapat:
 - a. Mengurangi ketidakpercayaan masyarakat dengan petugas;
 - b. Meningkatkan kemauan masyarkat membayar pajak.
4. Menginstruksikan penyusunan tim untuk bekerja mengidentifikasi dan mengukur Potensi rill PAD daerah, guna membantu pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah
5. Menginstruksikan Dinas terkait pemungutan pajak menyusun data Base seluruh objek wajib pajak daerah.
6. Membangun Koordinasi antara pemerintah provinsi dan daerah serta tranparan informasi pendapatan bagi hasil daerah
7. Meningkatkan SDM terkait bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah melalui bimbingan, pelatihan, pendidikan, bagi perangkat daerah terkait.
8. Berkoordinasi dengan DPRD menyelesaikan Keterbatasan Regulasi/regulasi tidak lengkap dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah

9. Menginstruksikan kepada Kepala BPPKAD masing-masing daerah melakukan evaluasi pada SKPD penghasil PAD atas peyeteran pendapatan SKPD, dalam rangka memantau kesesuaian Peyeteran PAD setiap tahun.
 10. Menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar dapat transparan dan Akuntabel memberikan informasi pengelolaan kekayaan daerah.
 11. Menginstruksikan kepada lembaga-lembaga penyeter pajak agar penyeteran dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan.
 12. Menginstruksikan kepada lembaga pelayanan pajak agar selalu berkoodinasi baik lembaga di pemerintah daerah, maupun antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
 13. Menginstruksikan kepada kepala Dinas pendapatan masing-masing daerah agar selalu melakukan pengawasan terhadap kesesuaian penerimaan PAD dan penyeteran PAD oleh petugas pungut di lapangan.
 14. Mengoptimalkan kinerja lembaga-lembaga yang bertanggungjawab dalam penyelesaian sengketa lahan.
2. Rekomendasi kepada DPRD
DPRD diharapkan dapat berkoordinasi dengan PEMDA menyelesaikan Keterbatasan Regulasi/regulasi tidak lengkap dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan asli daerah.
 3. Rekomendasi kepada Gubernur provinsi Maluku
Pemerintah provinsi diharapkan dapat mengawasi/ mengawal rekomendasi penelitian ini.
 4. Rekomendasi kepada Kementerian dalam Negeri
Kementerian dalam negeri diharapkan dapat membantu menginstruksikan rekomendasi tersebut kepada daerah, dan memantau tindak lanjut dari rekomendasi tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Australian National Audit Office (2002), *Performance Information in Portfolio Budget Statements, Better Practice Guide* (May).
- Badan Litbang Depdagri RI Dan FISIPOL – UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.
- BAPPENAS, 2003, Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD Dan Upaya Yang Dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Bastian, Indra, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga. Jakarta. 2006.
- Bisma, Gde I Dewa, Dan Susanto Hery, 2010, Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Tahun Anggaran 2003 – 2007, Jurnal, *Ganeç Swara* Edisi Khusus Vol. 4 No.3.
- Bouckaert, G. and B. G Peters, 2002, *'Performance Measurement and Management: The Achilles' Heel in Administrative Modernization'*, *Public Performance and Management Review*, Vol. 25, No. 4. pp. 359–62.
- Braun, Virginia, Victoria Clarke. 2006. *Using Thematic Analysis in Psychology. Dept. of Psychology the University of Auckland, Auckland, NZ and Faculty of Applied Science the University of the West England Frenchay Campus, Bristol, UK.*
- Brusca, Isabel and Montesinos Vicente, 2013, *'From Rhetoric to Practice: The Case of Spanish Local Government Reforms'*.
- Cooper, D.R. dan P.S. Schindler. 2014. *Business Research Methods. New York, 12th Edition. McGraw Hill International Edition.*
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Elmi, B. 2002. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya Dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Daerah Otonom. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 6 Nomor 4.
- Engstrom, John H, and Copley A. Paul, *Essentials of accounting for governmental and non-for-profit organizations. Sixth edition. McGraw-Hill, 2002.*
- Faguet, J. P. And Sanchez, F. 2006. *Decentralization's Effects of Educational Outcomes in Bolivia and Colombia. The Suntory Centre Suntory and Toyota International Centers for Economics and Related Disciplines London School of Economics and Political Science. London: WC2A 2AE.*
- Halim, Abdul, Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama, UPF Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta, 2001.
- _____, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta. 2004.
- _____, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Tiga, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- _____, Dan Mujib, I. Problem Desentralisasi Dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah. Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta. 2009.
- _____, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Hartono, Jogyanto, Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman, Edisi Enam, BPFE, Yogyakarta, 2013.

- Hulu, Erdianto, 2009, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Hubungannya Dengan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran: Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa, Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Jawing, Rorbert Edi, 2014, Pemekaran Daerah Otonomi Baru: Bayi Premature Yang Tumbuh Abnormal, Jurnal CSIS, Pemekaran Daerah Dan Problem Rempresentasi Politik.
- Jaya, Wihana, Kirana, Analisis Potensi Keuangan Daerah, Pendekatan Makro, PPPEB UGM, Yogyakarta, 1999.
- Kaho, Yosef Riwu, Prospek Otonomi Daerah Di NKRI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001.
- Kamal, Mustafa, 2011, Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2007-2009, Tesis, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Profil Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Maluku, (kemendagri.go.id)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2012, Tinjauan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Provinsi Maluku.
- LAN-BPKP, 2000, Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istitut Pemerintah. LAN-RI. Jakarta.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun pemeriksaan 2011-2014
- _____, BPK atas LKPD Kabupaten Buru Tahun pemeriksaan 2011-2014
- _____, BPK atas LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun pemeriksaan 2011-2014
- _____, BPK atas LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun pemeriksaan 2011-2014
- _____, BPK atas LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun pemeriksaan 2011-2014
- _____, BPK atas LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun pemeriksaan 2011-2014
- _____, BPK atas LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun pemeriksaan 2011-2014
- _____, BPK atas LKPD Kota Tual Tahun pemeriksaan 2011-2014
- Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, Dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial Dan Politik, Edisi Dua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2010.

- Mahsun, Mohammad. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE UGM. Yogyakarta, 2009.
- Mandell, Lee M, 1997, *Performance Measurements and Management Tools in North Carolina Local Government. Public Administration Quarterly; spring 1997; Vol. 21: 96.*
- Manullang, M, Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1973.
- Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta, 2002.
- _____, Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009.
- Mawardi, Gusti, 2002, Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Ditinjau Dari Proses Dan Pengalokasia, Tesis, Program Pasca Sarjanan UGM, Yogyakarta.
- Moleong, J. Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Munir, D. Dkk, Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah, YPAPI, Yogyakarta, 2005.
- Nordiawan, Deddi dan Hertiant Ayuningtyas, Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta. 2010.
- Noviandri, Betha Yudha, 2011, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Keuangan Daerah Di Dinas Kesehatan Kota Palembang, Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Pasarakan, Rakhmadi, 2009, Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 1994/1995-2007, Tesis, UGM, Yogyakarta.
- Prawirosentono, Suryadi, Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Kebijakan Kinerja Karyawan, BPFE, Yogyakarta, 1999.
- Rai, I Gusti Agung, Audit Kinerja Pada Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Samah, O Samsuol, 2002, Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soamole, Barkah, 2010, Evaluasi Aspek Keuangan Kabupaten Pemekaran: Studi Kasus Kabupaten Halmahera, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Solikhin, 2014, Evaluasi Penumpukan Pencairan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Di Akhir Tahun Anggaran Pada Satuan Kerja, Tesis, Magister Akuntansi Terapan. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). Cetakan Kelima. Alfabeta. Bandung, 2014.
- Syamsi, Ibnu, Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara, Rineka Cipta, 1994.
- Tambuyun, et al, 2014, Jurnal, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Manado, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Tenrini, Helbr Rita, 2013, Pemekaran Daerah: Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi? Menyibak Kegagalan Pemekaran. Jurnal, Kajian Pusat Kebijakan APBN (KPAPBN).
- Vakkuri, Jarmo and Meklin Pentti, 2006, *Ambiguity in Performance Measurement: A Theoretical Approach to Organisational Uses of Performance Measurement*.
- Waldman, David A., 1994, *The Contribution Of Total Quality Management To A Theory Of Work Performance*, *Academy Of Managemen Review*, Vol 19 No.3, Pp 210.
- Waluyo, J. 2007. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Indonesia. Kampus UI. Depok.
- Wilson, Earl R., And Catellus Susan C., *Accounting For Governmental and Nonprofit Entities*, 13th Edition, *Mcgraw-Hill Irwin*, 2004.
- Wirawan, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi Dan Penelitian. Jilid 1, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- World Bank, 2006, Kinerja Pengelolaan Keuangan Publik Di Aceh, Laporan Penelitian.
- Yang, K. and M. Holzer, 2006, *The Performance-Trust Link: Implications for Performance Measurement*, *Public Administration Review*, Vol. 66, No. 1, pp. 114–26.
- Zakiah, Mariksa. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2001-2007. Tesis. Magister Manajemen Agrarian UGM. Yogyakarta.